

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun

Reza Pridima Putri^{1*}, Halmawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rezapridimaputri15@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of the internal control system and the clarity of budget targets on managerial performance. The population in this study is the regional work unit in Karimun Regency, totaling 27 SKPD, and Respondents in this study were the head of the office, secretary and head of the field at the SKPD. The type of research used in this study is a quantitative approach using primary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires directly to 81 respondents. The data was then analyzed using multiple linear regression techniques. The results of this study are (1) the internal control system has a positive effect on managerial performance in the Karimun Regency Regional Apparatus Work Unit (SKPD), (2) the clarity of budget targets has a positive effect on managerial performance in the Karimun Regency Regional Apparatus Work Unit (SKPD).

Keywords : *Clarity of Budget Targets; Internal Control System; Managerial Performance.*

How to cite (APA 6th style)

Putri, R.P & Halmawati. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (2), 336-348.

PENDAHULUAN

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi bertugas melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, serta mengawasi penerapan pedoman penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Bersama dengan itu, kinerja menjadi penting bagi organisasi sektor publik karena merupakan pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi.

Fenomena terkini juga terkait dengan lemahnya sistem pengendalian intern organisasi perangkat daerah Kabupaten Karimun. Sebagai auditor eksternal, BPK RI melakukan audit atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dengan tujuan untuk menyatakan pendapatnya atas kecukupan dan kewajaran informasi keuangan yang dimuat dalam laporan keuangan. Salah satu kriteria untuk pemberian opini adalah dengan mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan BPK terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah dapat dilihat pada laporan hasil audit sistem pengendalian internal yang ditunjukkan dengan banyak ditemukannya kelemahan sistem pengendalian internal.

Banyaknya kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah lemah. Kelemahan sistem pengendalian intern terdiri dari kelemahan pelaporan akuntansi, kelemahan pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian (radarkepri.com).

Pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Pengelola SKPD Pemerintah Kabupaten Kalimun diawali dengan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengelolaan, Akuntansi, Pelaporan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. BPK mengidentifikasi adanya audit ketidakpatuhan yang terungkap oleh LHP pada LKPj 2019 di Kabupaten Karimun. Pelanggaran ini telah ditunjukkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Penataan Ruang. Temuan utama ketidaksesuaian antara lain pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak tepat, ketidaksesuaian pelaksanaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, dan kurangnya pekerjaan dalam tiga paket pekerjaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), penerima bantuan hibah, dan bantuan sosial belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (radarkepri.com).

Dalam laporan dari kepri.bpk.go.id, pejabat BPK di Kepulauan Riau juga mengidentifikasi beberapa masalah terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada undang undang. masalah terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada tersebut diantaranya yaitu pemembuatan anggaran tahun anggaran 2020 yang tidak mempertimbangkan peluang ekonomi daerah, merealisasikan belanja pegawai di Kementerian Pendidikan, Bappenda, dan Badan Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penagihan barang yang dikeluarkan kepada pihak ketiga tidak dilakukan sesuai aturan, ada kekurangan pekerjaan di enam pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan pengelolaan keuangan dan kas daerah belum memadai dan tertib. Kondisi ini disebabkan kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, selain itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan beberapa variabel untuk meneliti kinerja manajerial, seperti sistem pengendalian internal dan kejelasan tujuan anggaran. Penelitian oleh Gustina dan Febriyanti (2020) menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran untuk kinerja manajerial. Survei menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi sudah mengetahui tentang tujuan yang perlu dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja. Melia dan Sari (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. Apabila tujuan dinyatakan dengan jelas maka akan mendorong pegawai organisasi untuk lebih giat bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi dengan begitu kinerja manajerial dalam organisasi akan meningkat.

Aziz dkk, (2018) melakukan penelitian menggunakan variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim, dkk (2016) melakukan penelitian dengan menguji variabel sistem pengendalian internal terhadap kejelasan sasaran anggaran, dapat disimpulkan jika sistem pengendalian internal diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan maka kinerja manajerial akan meningkat.

Penelitian dengan variabel Sistem pengendalian Internal dilakukan di kabupaten karimun mengingat hasil temuan BPK dimana masih ditemukanya permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan

dalam dua tahun terakhir yaitu pada TA 2019 dan TA 2020. Selain itu berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya untuk menggunakan variabel yang relevan agar kemampuan variabel independen lebih kuat memberi pengaruh terhadap variabel dependen sehingga penulis menambahkan satu variabel yang mendukung yaitu kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan dalam teori agensi sebagai kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang mengharuskan agen untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Menurut Scott (2003), hubungan antara masyarakat dan pemerintah didasarkan pada kontrak antara badan pemerintah (agent) dengan masyarakat (principal) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal berhak menilai kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat harus mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakatnya.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penerapan sistem pengendalian internal, yang mengharuskan pemerintah sebagai agen bertanggung jawab atas kinerja dan memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja manajerial adalah penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah tersebut. Adanya sistem pengendalian internal, seluruh proses pengujian, peninjauan, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dari organisasi akan memberikan jaminan yang wajar bahwa kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan oleh karena itu, dengan peningkatan sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD.

Goal Setting Theory

Goal Setting Theory atau teori penetapan tujuan dikembangkan oleh Edwin Locke pada akhir 1960-an. Edwin Locke menemukan bahwa tujuan sulit tertentu akan mengarah pada kinerja yang baik dan mudah dicapai. Menurut Locke dan Lathan (1960), manajemen dalam organisasi perlu menetapkan tujuan secara jelas untuk meningkatkan kinerja individu dalam organisasi. Organisasi yang melibatkan karyawan dalam menetapkan tujuan kinerja cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja yang hanya ditetapkan oleh atasan saja. Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara penetapan tujuan dan prestasi kerja. Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah individu dalam organisasi memahami bahwa tujuan atau sasaran yang jelas akan mempengaruhi kinerjanya.

Implikasi dari *Goal Setting Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa untuk kinerja manajerial yang optimal harus ada kesesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Individu yang memahami tujuan (sasaran) anggaran yang jelas dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan memiliki prestasi kerja (kinerja) lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak mengetahui tujuan (sasaran) anggaran secara jelas serta tidak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Melia dan Sari, 2019).

Teori ini juga mengatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh ide (pemikiran) dan niatnya sendiri. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang harus dicapai individu. Ketika seseorang berkomitmen untuk mencapai tujuan, maka akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi dari kinerja mereka. Teori ini juga menjelaskan

bahwa penetapan tujuan yang menantang dan hasil yang terukur dapat meningkatkan kepuasan kerja (kinerja), diikuti dengan keterampilan dan kemampuan kerja. Berdasarkan uraian di atas, diasumsikan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal, harus ada kesesuaian antara tujuan individu dan organisasi. Dengan menggunakan pendekatan *goal setting theory*, kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah tujuannya.

Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial adalah seberapa efektif dan efisien seorang manajer atau pelaksana dalam mencapai tujuan pemerintah yang terkait dengan perencanaan, penelitian, evaluasi, koordinasi, pemilihan staff, pengawasan, perwakilan, dan negosiasi. Kinerja manajerial didefinisikan sebagai seberapa efektif dan efisien seorang manajer bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk lain dari kinerja manajerial adalah memotivasi bawahan untuk mengidentifikasi tujuan anggaran, mendiskusikan tujuan anggaran serta melaksanakannya.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses komprehensif dari tindakan dan kegiatan yang diambil oleh manajemen dan karyawan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan mereka, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Mahmudi, 2016). Dalam PP No. 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses menyeluruh dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan seluruh karyawan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPIP", yaitu sistem pengendalian intern yang dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah diatur pada PP No. Tahun 2008 No. 60, yang diadopsi dari The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut pendapat Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jelas dan spesifik tujuan anggaran dinyatakan sehingga penanggung jawab pencapaian anggaran dapat memahaminya. Kenis menemukan bahwa pelaksana anggaran yang jelas dan sulit berdampak sangat kuat dalam meningkatkan kinerja manajerial. efek tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas adalah kepuasan kerja yang meningkat, ketegangan kerja yang berkurang, peningkatan kinerja oleh karyawan, dan efektivitas biaya pelaksana anggaran. Locke (1968) dalam Kenis (1979) tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan baik akan membuat kinerja menjadi meningkat dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas dan membingungkan. Organisasi harus memastikan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik agar tujuan organisasi tercapai sesuai yang di harapkan. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menjelaskan kinerja manajerial suatu organisasi akan lebih baik apabila tujuan organisasi telah ditetapkan secara jelas hal ini akan memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, yang berdampak positif pada kinerja.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial

Pernyataan PP No. 8 Tahun 2006 bahwa tujuan pengendalian internal adalah memberikan keyakinan dan memastikan yang memadai pada keandalan laporan keuangan yaitu laporan keuangan dapat di percaya, berjalannya suatu organisasi dengan efektif dan efisien serta memastikan kepatuhan suatu organisasi melakukan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan. Menurut Mulyadi (2013), Sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi, metode dan tindakan untuk menjaga aset, memastikan keakuratan dan keandalan laporan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi.

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip tentang suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menunjuk orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Hubungan sistem pengendalian internal terhadap *theory agency* adalah dimana pemerintah sebagai *agent* memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal* untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja manajerial adalah penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah tersebut. Apabila sistem pengendalian internal pada suatu organisasi dijalankan secara efektif dan efisien, serta kesadaran karyawan yang tinggi untuk menjalankan sistem pengendalian dengan baik maka akan meningkatkan kinerja manajerial organisasi tersebut.

Berdasarkan penelitian Hamdani dan Basri (2016), sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini sejalan dengan Mamuya dan Kewo (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Semakin baik implementasi pengendalian internal maka akan meningkatkan kinerja manajerial. Beberapa peneliti lain juga menemukan bahwa terdapat pengaruh positif Sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial (Afrida, 2013; Putri, 2013, Hakim, Asmony dan Inapty 2016; Darmawan, 2016; Candrakusuma dan Jatmiko, 2017; Hamdani dan Basri, 2016; Aziz, Pratiwi dan Suyono, 2018; Anwar, 2018). Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefinisikan sebagai rencana tindakan yang mengukur apa yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Salah satu ciri dari sistem penganggaran adalah kejelasan tujuan anggaran. Salah satu ciri dari sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. tujuan dan sasaran anggaran di buat secara jelas dan spesifik agar mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran dapat memahami anggaran (Kenis, 1979).

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory dikemukakan oleh Locke (1968), yang menunjukkan adanya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Teori ini menjelaskan bahwa jika suatu organisasi memiliki tujuan dan sasaran yang jelas maka akan mempengaruhi kinerjanya. Hubungan *goal setting theory* dengan kejelasan sasaran anggaran adalah bahwa untuk mencapai kinerja manajerial yang optimal, harus ada kesesuaian antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Individu yang memahami tujuan (sasaran) anggaran yang jelas akan memiliki prestasi kerja (kinerja) lebih baik dibandingkan dengan individu yang tidak mengetahui tujuan (sasaran) anggaran secara jelas. Hal ini sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Kenis (1979) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Semakin jelas tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh suatu organisasi maka akan semakin meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Berdasarkan penelitian Qotrunnada, dkk (2018), Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Natalia, dkk (2019), bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Dapat disimpulkan adanya kejelasan sasaran anggaran yang di terapkan secara baik dalam suatu organisasi akan memudahkan kan manajemen suatu organisasi untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai. hasil yang sama ditemukan beberapa peneliti bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial (Efrizar, 2017; Melia dan Sari, 2019; Darmawan, 2016; Candrakusuma dan Jatmiko, 2017; Kanji, 2018; Seber, Rustam dan Husein, 2019; Gustina dan Febriyanti, 2020). Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris dapat dinyatakan hipotesis berikut:

H₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Karimun. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. Terdapat 81 pejabat struktural dari 27 SKPD yang ada di Kabupaten Karimun. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala dinas/badan/kantor, sekretaris/ sederajat sekretaris dan kepala bidang/bagian/subdinas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Peneliti memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Menduduki jabatan kepala dinas/badan/kantor, sekretaris/ sederajat sekretaris dan kepala bidang/bagian/subdinas. (2) Terlibat dalam proses penyusunan anggaran (3) Telah menduduki jabatan minimal satu tahun. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Variabel Penelitian

Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ukuran seberapa efektif dan efisien pengelola atau pelaksana dalam mencapai tujuan pemerintah dalam hal perencanaan, investigasi, evaluasi, koordinasi, pemilihan staff, pengawasan, perwakilan, dan negosiasi. Mengadopsi dari Mahoney *et al.* (1963), kinerja manajerial dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Perencanaan, Investigasi, Evaluasi, Koordinasi, Pemilihan Staf, Pengawasan, Perwakilan, dan Negosiasi.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses menyeluruh dari tindakan yang dilakukan oleh manajemen pelaksana dan pegawainya dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan informasi keuangan, perlindungan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengadopsi dari PP RI No. 60 tahun 2008, Sistem penegndalian internal dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jelas tujuan dan sasaran anggaran dinyatakan agar dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas tercapainya sasaran anggaran tersebut. Indikator pada variabel ini mengacu pada Locke dan Latham (1984) dalam Putra (2013), meliputi: Tujuan, Kinerja, Standar, Jangka Waktu, Sasaran Prioritas, dan Tingkat Kesulitan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 81 yang terdiri dari pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah Kabupaten Karimun, yang terdiri dari kepala dinas/badan/kantor, sekretaris/serendaharta sekretaris dan kepala bidang/bagian/subdinas. Dari total sampel tersebut disebar kuesioner sebanyak 81 dan kuesioner yang dikembalikan sebanyak 78 kuesioner. Waktu penyebaran kuesioner yaitu 27 Oktober 2021 s/d 27 November 2021. Berikut gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1
Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar	81
Jumlah kuesioner yang kembali	78
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	78
Respon Rate	96%

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 2
Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> terkecil	Keterangan
Kinerja Manajerial (Y)	0,501	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,491	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0,764	Valid

Nilai terkecil dari *Corrected Item- Total Correlation* terkecilnya untuk variabel Kinerja manajerial adalah 0,501, variabel sistem pengendalian internal adalah 0,491, dan variabel kejelasan sasaran anggaran 0,591. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan variabel Y, X1 dan X2 adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Uji Reabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Keinerja Manajerial (Y)	0.829	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0.865	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0.876	Reliabel

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,6. Instrumen kinerja manajerial memiliki *Cronbach's Alpha* 0,829, instrumen sistem pengendalian internal memiliki *Cronbach's Alpha* 0,865, dan instrument kejelasan sasaran anggaran memiliki *Cronbach's Alpha* 0,876. Sehingga setiap variabel dikatakan reliabel, selanjutnya untuk item masing-masing konsep variabel layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
	N	78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.27024459
Test Statistic		0.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.053

Nilai seluruh variabel dari *kolmogrov smirnov Z* sebesar 0,130 dengan signifikan 0,053. Dari pengolahan data tersebut dapat disimpulkan data dalam penelitian berdistribusi secara normal. karena nilai signifikansi dari jumlah normalitas > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Uji Multikoleniaritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal	0,596527778	1.164
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,596527778	1.164

Variabel sistem pengendalian internal (X1) dengan nilai VIF 1,164 dan *tolerance* 0,859 dan kejelasan sasaran anggaran (X2) dengan nilai VIF 1,164 dan *tolerance* 0,859 maka dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan lainnya. Variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas karena nilai VIF seluruh variabel ≤ 10 dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil perhitungan pada Tabel 6 dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig > α 0,05. nilai signifikansi untuk variabel sistem pengendalian internal (X1) 0,135 > 0,05 dan variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) 0,679 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-2,656	2,423	-1,096	0,277
Sistem Pengendalian Internal	0,079	0,052	1,511	0,135
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,027	0,065	0,416	0,679

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	14.771	3.623	4.076	0.000	
Sistem Pengendalian Internal	0.186	0.078	2.368	0.020	Hipotesis Diterima
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.208	0.097	2.139	0.036	Hipotesis Diterima
Regression F	F:	8.138		0.001	
Adjusted R ²		0.156			

Berdasarkan Tabel 7 dapat dianalisis model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,771 + 0,186 X1 + 0,208 X2 + e$$

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 14.771 jika variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran bernilai konstan (0), maka nilai Kinerja manajerial adalah sebesar 14.771. Koefisien regresi variabel Sistem pengendalian Internal (b_1) bernilai positif sebesar 0.186. Hal ini menunjukkan bahwa jika Sistem Pengendalian Internal mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Kinerja Manajerial sebesar 0.186 satuan. Koefisien regresi variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (b_2) bernilai positif sebesar 0.208. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kejelasan Sasaran Anggaran mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial sebesar 0.208. *Error*=3.623. *Error* yang terdapat dalam persamaan regresi di atas menunjukkan adanya resiko kesalahan, ini bermakna sedikit atau banyak keputusan dalam penolakan atau penerimaan hipotesis mengandung kemungkinan terjadi kesalahan.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai F Hitung yaitu 8,138 dan nilai Signifikansi 0,000. Nilai F tabel untuk 78 responden adalah 3,11 maka dapat disimpulkan bahwa F Hitung > F Tabel yaitu 8,138 > 3,11 dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Adjusted R Square dari hasil olah data di atas adalah 0,156. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial adalah sebesar 15,6%, sedangkan 84,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama adalah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Variabel sistem

pengendalian internal (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,368 dan nilai sig. adalah 0,020. maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,368 > 1,665$ atau nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel sistem pengendalian internal (X1) bernilai positif sebesar 0,186. Hal ini membuktikan sistem pengendalian internal (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hipotesis kedua adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Dengan nilai t hitung sebesar 2,139 dan nilai sig. adalah 0,036. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,139 > 1,665$ atau nilai signifikansi $0,036 < 0,05$. Nilai koefisien β sebesar 0,208. Hal membuktikan Kejelasan sasaran anggaran (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial, dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Hal ini terlihat dari hasil uji Analisis Regresi Berganda yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk sistem pengendalian internal adalah sebesar $0,020 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,368 > t_{tabel}$ sebesar 1.665. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik kinerja manajerial.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan semakin meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam PP No. 8 tahun 2006 bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila manajemen telah mampu melakukan hal ini dengan baik maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan kepada manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan meningkatkan kinerja manajer itu sendiri.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Mamuaya dan Kewo (2019) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian intern terhadap kinerja manajerial secara parsial. Penelitian yang sama juga ditemukan oleh Aziz, dkk (2018), Anwar (2018), Candakususma dan Jatmiko (2017), Drmawan (2016), Hakim, dkk (2016), Hamdani dan Basri (2016, Putri (2013), Afrida (2013).

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Hal ini terlihat dari hasil uji Analisis Regresi Berganda yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk sistem pengendalian internal adalah sebesar $0,036 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,139 > t_{tabel}$ sebesar 1.665.

Pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD adalah bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustina dan Febriyanti (2020), yang melakukan penelitian pada SKPD Kabupaten Indar Giri Hilir, manajer tingkat menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah sudah mengetahui dengan jelas tujuan mana yang perlu dicapai sehingga akan meningkatkan kinerja.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Melia dan Sari (2019) yang melakukan penelitian di SKPD Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini menjelaskan jika manajer tingkat menengah SKPD mengetahui dengan jelas sasaran dan tujuan yang akan dicapai maka akan meningkatkan kinerja SKPD itu sendiri dalam mencapai tujuan. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep Goal Setting Theory yang menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang kurang jelas dan mudah. Memiliki tujuan yang jelas dalam suatu organisasi dapat membuat karyawan atau manajer bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan sehingga akan meningkatkan kinerja itu sendiri. Penelitian yang sama juga ditemukan oleh Putra (2013), Matondang, dkk (2015), Darmawan (2016), Candrakusuma dan Jatmiko (2017), Efrizar (2017), Qotrunnada (2018), Kanji (2018), Seber, dkk (2019), Natalia, dkk (2019).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Penelitian ini hanya menggunakan objek manajerial satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karimun. Oleh sebab itu hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, sehingga kemungkinan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner serta pertanyaan yang mungkin tidak dipahami responden sehingga hasil kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut: Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian internal efektif dan efisien sehingga kinerja manajerial akan meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun terkait agar sasaran anggaran ditetapkan secara jelas sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya sehingga kinerja manajerial dapat meningkat. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian serta memperluas lagi objek penelitian agar bisa digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2013). Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern Pemerintah terhadap kinerja manajerial skpd (studi empiris pada pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Anwar, A. (2018). Efek Moderasi Dari Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengendalian Intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(1), 30-39.

- Bangun, A. (2009). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang). Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Candrakusuma, D. A., & Jatmiko, B. (2017). Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1).
- Darmawan, R., Azlina, N., & Hariyani, E. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di Skpd Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Efrizar, R., Hardi, & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *JOM Fekon*, 4(1), 1726–1740.
- Gustina, i., & febriyanti, f. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 24-36.
- Hamdani, E. H., & Basri, H. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi Kerja dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 9(1), 19-26.
- Hakim, L., Asmony, T., & Inapty, B. A. (2016). Pengaruh komitmen organisasional, sistem pengendalian intern pemerintah, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajerial (survey pada SKPD Sumbawa dan Sumbawa Barat). *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(2), 67-82.
- Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes, and Performance. *Journal Accounting Review*, pp. 707- 721.
- Kewo, C. L. (2017). The influence of internal control implementation and managerial performance on financial accountability local government in indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293-297.
- Laskmi, Ayu Chairina dan Prasetyo Nugroho. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XXI*.
- Locke, E. A. dan Latham, G. P. 1960. New Directions in Goal-Setting Theory. *Journal Association for Psychological Science* Volume 15, pp. 265-268.
- Mahoney, et al. 1963. Development of Managerial Performance. A Research Approach Cincinnati. *South Western Publishing*.
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068-1079.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyadi, 2013, Sistem Akuntansi. Edisi 3, Cetakan 3, Jakarta, Salemba Empat
- Natalia, P. L., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi dan Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).

- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan kerja perangkat daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Putri, G. Y. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Qotrunnada, S. S., Wiratno, A., & Supeno, S. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 3(1), 73-85.
- Radar Kepri. 2020. Di Karimun, Hibah Senilai Rp 31, Miliar Bisa Cair Tanpa Proposal Permintaan. Diakses pada 1 Maret 2021, dari <https://radarkepri.com/di-karimun-hibah-senilai-rp-31-miliar-bisa-cair-tanpa-proposal-permintaan/>.
- Radar Kepri. 2020. Ratusan Juta Dana Hibah Dan Bansos Bermasalah di Karimun. Diakses pada 1 Maret 2021, dari <https://radarkepri.com/ratusan-juta-dana-hibah-dan-bansos-bermasalah-di-karimun/>.
- Radar Kepri. 2020. Proyek Senilai Rp 13,7 Miliar di PUPR Karimun Tak Selesai Tapi Dibayar Full. Diakses pada 1 Maret 2021, dari <https://radarkepri.com/proyek-senilai-rp-137-miliar-di-pupr-karimun-tak-selesai-tapi-dibayar-full/>.
- Rivai, V. dan Basri A. F. 2005. Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scott, W. R. 2003. Financial Accounting Theory. Second edition. Prentice Hall. Canada.
- Siaran Pers BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau. 2021. Karimun susul Enam Pemda Lainnya Raih Opini WTP. Diakses pada 11 Juni 2021, dari <https://kepri.bpk.go.id/karimun-susul-enam-pemda-lainnya-raih-opini-wtp/>.
- Siregar, M. R. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Medan.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.